

PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENYEDIAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS BAGI PELAJAR



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SEMARANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmad dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan angkutan sekolah gratis dapat lebih cepat, mudah, sehingga manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat luas, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini membawa manfaat untuk peningkatan layanan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Semarang, 23 April 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SEMARANG**


TRI MARTONO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP./196703221995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance), pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sebagai penyedia pelayanan maka pemerintah diwajibkan untuk terfokus memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diperhatikan adalah pada sektor transportasi. Fungsi transportasi menjadi salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam hal pergerakan manusia maupun barang yang merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang menjadikan transportasi berperan penting dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi kondisi saat ini trayek angkutan umum di Kabupaten Semarang belum semua melewati seluruh wilayah di daerah pinggiran di Kabupaten Semarang. Trayek angkutan umum sebagian umum masih melayani kawasan perkotaan tetapi belum melayani kawasan perbatasan begitu juga dengan sekolah - sekolah pinggiran tidak semua dilewati oleh trayek

angkutan umum sehingga menyulitkan anak sekolah untuk berangkat dan pulang dari sekolah. Sebagian anak sekolah biasanya diantar oleh orang tua tetapi sebagian yang lain menggunakan kendaraan sendiri sehingga dapat membahayakan diri sendiri.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Semarang melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar, memberikan layanan penyediaan angkutan sekolah gratis untuk sekolah pinggiran dan sekolah perbatasan.

Saat ini penyediaan angkutan sekolah gratis untuk sekolah pinggiran dan sekolah perbatasan baru melayani 6 (enam) sekolah di 3 (tiga) kecamatan dari 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Semarang, dimana lokasi 6 (enam) sekolah tersebut telah di sebutkan pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Mengapa lokasi penyediaan angkutan sekolah gratis untuk sekolah pinggiran dan sekolah perbatasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar dirumuskan sebagai berikut:

Mengubah aturan pada pasal 5 ayat 2 sehingga penetapan dan penambahan lokasi layanan di kemudian hari dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat sehingga tidak mengganggu proses layanan penyediaan angkutan sekolah gratis.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau merupakan tanggung jawab pemerintah, hal ini telah di maklumkan dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal ini kemudian di pertegas kembali pada pasal 139 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas Penyediaan angkutan umum dalam Daerah kabupaten/kota maka untuk menyediakan angkutan umum utamanya pada daerah pinggiran dan perbatasan diperlukan intervensi berupa subsidi dari pemerintah guna mendorong tumbuh dan berkembangnya angkutan umum di suatu daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan, bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan, dimana pada peraturan Presiden dimaksud telah di rinci sasaran hingga tujuan subsidi.

Lebih lanjut, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar telah menerangkan ruang lingkup pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar di Kabupaten Semarang mulai dari tata cara pelaksanaan hingga pembinaan dan pengawasan pelaksana layanan angkutan sekolah gratis.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dan arah pengaturan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar adalah pengaturan lokasi penetapan layanan angkutan sekolah gratis, dimana tadinya di tuangkan dalam Peraturan Bupati di maksud, namun agar perubahan dan penambahan lokasi layanan di kemudian hari maka ditetapkan dalam keputusan bupati.

Diharapkan dengan rancangan perubahan peraturan bupati ini dapat meningkatkan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang khususnya pada layanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar dan dikemudian hari dapat mempercepat perluasan layanan angkutan sekolah gratis dimaksud.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini ada pada pasal 5 dimana penetapan lokasi tidak lagi dituangkan dalam Peraturan Bupati namun ditetapkan dengan ketetapan Bupati

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang khususnya pada layanan angkutan sekolah gratis bagi pelajar dan dikemudian hari dapat mempercepat perluasan layanan angkutan sekolah gratis maka perlu mengevaluasi pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar.
2. Tujuan yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam menetapkan lokasi layanan angkutan sekolah gratis.

B. Saran

Perlu segera ditetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar dalam rangka peningkatan layanan angkutan sekolah gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar